

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi nasional adalah mencapai masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara berusaha untuk meningkatkan pendapatan nasional. Apabila pendapatan nasional meningkat, dengan asumsi *ceteris paribus*, maka pendapatan perkapita masyarakat juga akan meningkat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka pemerintah melaksanakan berbagai program pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan yang telah dilakukan. Pertumbuhan ekonomi juga berguna untuk menentukan arah pembangunan pada masa mendatang. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dipengaruhi oleh akumulasi modal, sumber daya alam, sumber daya manusia (*human resources*) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Todaro, 2000). Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan. Upaya pertumbuhan ekonomi yang positif dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan negara atau daerah di seluruh Indonesia.

Dalam masa orde baru, pembangunan nasional yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang ada, pada kurun waktu 1970 an, banyak bertumpu pada sektor minyak dan gas bumi. Penerimaan negara dari ekspor minyak dan gas bumi pada awal Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I sebesar 20% dan pada awal Pelita II (1974-1975) naik sebesar 54.6 Pada tahun anggaran 1981/1982 ekspor minyak dan gas bumi menyumbang 72.6% dari penerimaan negara. Sehingga dapat dikatakan pada awal orde baru, sektor minyak dan gas bumi adalah sebagai lokomotif pembangunan. Dengan kontribusi yang cukup signifikan, tak mengherankan bila peranan sub sektor migas bagi pembangunan nasional cukup dominan Saat ini, kontribusi terbesar penerimaan negara diperoleh dari sektor

pajak, kemudian di bawahnya dari ekspor minyak dan gas bumi yang mencapai 23%.

Pembangunan daerah sebagai bagian yang terintegrasi dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui penciptaan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dengan harapan dapat mengubah struktur perekonomian daerah yang ada menjadi struktur perekonomian yang terus berkembang dan tangguh yang berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas dan pendapatan masyarakat yang lebih merata.

Tidak dapat dipungkiri hasil dari pembangunan yang dilakukan di seluruh Indonesia belumlah merata. Masih terdapat ketimpangan yang menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pembangunan antar wilayah. Terdapat ketimpangan yang cukup besar antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, Pulau Jawa dengan pulau lainnya dan juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Lebih dari 50% investasi berada di Jawa yang hanya mencakup 7% total wilayah Indonesia. Sedangkan output atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa menghasilkan lebih dari 60% total output Indonesia. PDRB walaupun mengandung beberapa kelemahan, namun sampai sekarang indikator ini masih diandalkan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan untuk secara nasional digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana merujuk pada pengertian nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian tersebut (Pratama, 2008:12). Case and Fair sendiri dalam (Pratama, 2008:12) mendefinisikan PDB sebagai *" the total market value of all final goods and services produced within in a given period, by factors of production within a country"*.

Pertumbuhan PDRB tidak terlepas dari investasi yang ada. Hal ini dikarenakan investasi yang ditanamkan diharapkan mampu mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/ pendapatan

(kenaikan output) dan permintaan input di masa yang akan datang sehingga berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi dari investasi dalam meningkatkan pendapatan.

Fungsi pertama adalah investasi dapat mendorong perekonomian melalui sisi permintaan. Fungsi kedua bahwa pengeluaran investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi, sehingga akan mendorong meningkatnya permintaan produksi. Dengan meningkatnya produksi akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Melalui peningkatan pendapatan para pekerja maka akan meningkatkan pula pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan pokok dari adanya kegiatan investasi adalah untuk meningkatkan produksi, penyempurnaan struktur industri, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pemanfaatan sumber daya alam dan manusia, mendorong ekspor dan memelihara lingkungan. Ketujuh tujuan pokok tersebut diatas diharapkan bekerja secara simultan dan efektif sehingga kegiatan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan investasi di daerah tidak akan terlepas dari iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif akan menjadi pertimbangan dan tolok ukur dalam melihat kemampuan dan kesiapan suatu daerah guna mengambil manfaat dan peluang yang sebesar-besarnya. Suatu investasi akan masuk ke suatu daerah bila daerah tersebut memiliki daya tarik investasi. Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintah dalam merencanakan suatu pembangunan perlu kiranya membuat kajian apakah memang memiliki peluang dan potensi yang besar untuk lebih bisa dikembangkan sehingga layak untuk ditawarkan kepada investor yang berminat. Investor domestik maupun mancanegara dalam menanamkan modalnya di suatu daerah memiliki alasan yang beragam tergantung pada motivasi perusahaan tersebut, yang salah satunya dalam kerangka industri minyak dan gas bumi, akan melihat apakah daerah yang dituju tersebut

mempunyai sumber daya alam minyak dan gas bumi yang cukup untuk diproduksi atau dihasilkan.

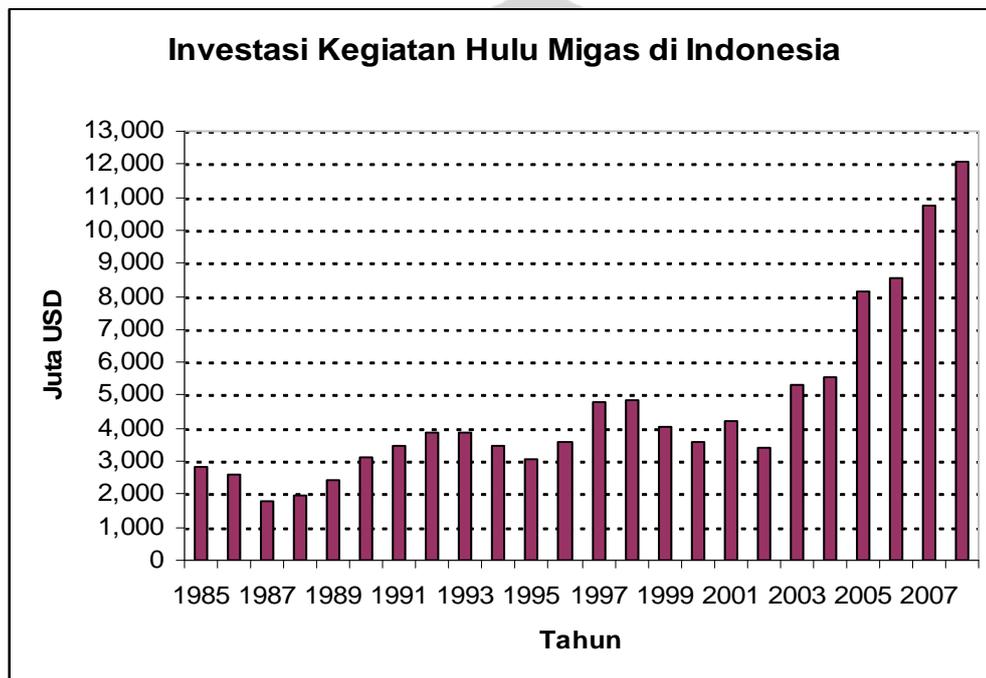
Dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, pemerintah dengan pelaku usaha swasta, masing-masing mempunyai beberapa prioritas utama yang menjadi orientasinya, (Seba 1998). Investor memiliki prioritas utama antara lain memaksimalkan dan mempercepat pengembalian investasi, mendapatkan pengembalian yang wajar atas resiko yang diambil, meminimumkan periode dimana investasinya beresiko, menjaga kontrak operasi untuk menjamin keekonomian produksi, meningkatkan cadangannya dan lain lain. Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan memiliki prioritas antara lain: memaksimalkan pendapatan dan memperkuat modal keuangannya, membangun dan mengembangkan industri lokal untuk memproduksi peralatan lapangan migas, meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan memaksimalkan transfer teknologi dan riset & pembangunannya. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki prioritas atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berupa peningkatan penerimaan negara dari minyak dan gas bumi mengingat penerimaan dari minyak dan gas bumi masih menjadi andalan dalam pembiayaan negara. Bagi Pemerintah daerah, keberadaan sumber daya alam berupa bahan tambang minyak dan gas bumi juga akan memberikan manfaat bagi daerahnya melalui pendapatan daerah dari alokasi Dana Bagi Hasil.

Berkaitan dengan peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, selain investasi dari dalam negeri oleh PERTAMINA, investasi juga dilakukan oleh investor asing<sup>1</sup> atau investasi dari mancanegara. Investasi mancanegara berupa penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment, FDI*) pada kegiatan pencarian dan penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan pada daerah-daerah yang mempunyai potensi atau cadangan minyak dan gas bumi yang ada di dalam wilayahnya. Investasi ini diperlukan untuk mendanai kegiatan pemetaan atau survei geologi dan geofisika (*survey G&G*), pemboran coba-coba (*wild-cat*)

---

<sup>1</sup> Dalam thesis ini yang dimaksudkan dengan investor asing disini adalah investasi yang dilakukan oleh para kontraktor kontrak kerja sama dalam bentuk *production sharing contract* (PSC) yang berasal dari perusahaan asing yang biasanya adalah perusahaan multinasional (MNC), selain PERTAMINA

dengan tujuan untuk memastikan ada tidaknya minyak dan gas bumi dalam suatu cekungan dan dilanjutkan dengan pengembangan suatu lapangan untuk memproduksi minyak dan gas bumi melalui pemboran sumur produksi. Karakteristik dari industri hulu minyak dan gas bumi yang padat modal, resiko dan teknologi tinggi mengakibatkan tidak banyak pelaku usaha swasta yang tertarik berinvestasi di sektor ini. Investasi pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia sendiri, pada periode tahun 1985 sampai dengan tahun 2008 secara umum mengalami fluktuasi dengan trend yang naik.



Sumber: Ditjen Migas

**Grafik 1.1. Investasi pada Kegiatan Hulu Migas di Indonesia**

Propinsi di Indonesia tidak semuanya mempunyai sumber daya alam berupa tambang minyak dan gas bumi yang terkandung di dalam perut bumi. Dari potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi yang ada, belum semuanya sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi. Hal ini disebabkan karena pada propinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi belum dilakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang mampu memproduksi minyak dan gas bumi. Dari data informasi yang diperoleh dari Ditjen Migas<sup>2</sup>,

<sup>2</sup> Data daerah penghasil migas disadur dari website Ditjen Migas, [www.migas.esdm.go.id/](http://www.migas.esdm.go.id/)

yang tercatat sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi adalah sejumlah 18 propinsi, yaitu: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua Barat. Hal ini dikarenakan dari hasil kegiatan pencarian dan penambangan minyak dan gas bumi yang telah dilakukan pada potensi cekungan-cekungan yang ada, pada propinsi tersebut telah didapatkan minyak dan gas bumi. Hasil produksi minyak dan gas bumi ini, setelah dikurangi dengan biaya produksi dan bagian dari investor, merupakan bagian negara dan dapat menjadi sumber penerimaan pendapatan bagi propinsi bersangkutan melalui alokasi dana bagi hasil sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 mengenai Dana Perimbangan.

Pada kurun waktu 2002-2008, terdapat 14 propinsi sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam minyak bumi yang menerima investasi dari mancanegara secara langsung melalui Kontraktor/Perusahaan asing dalam kegiatan usaha hulu minyak bumi. Pemilihan lokasi untuk investasi asing di daerah (propinsi) melalui penawaran wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi sudah barang tentu telah dipertimbangkan terlebih dahulu dan hal tersebut merupakan kebijakan rasional guna mencapai tingkat produktivitas, keekonomian dan keamanan. Apabila memperhatikan besarnya nilai investasi maka tampak sejak tahun 2002 sampai 2008, kondisi masuknya investasi asing langsung tidak merata di semua propinsi, meskipun secara pola memperlihatkan keadaan yang fluktuatif dengan kecenderungan yang naik. Hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan, melainkan terdapat faktor penyebabnya. Dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 ini, total nilai investasi yang paling besar yang masuk ke Indonesia terjadi pada tahun 2008 sebesar 6 Milyar USD dan sebelumnya pada tahun 2007 mencapai 4,9 Milyar USD. Adapun peringkat daerah berdasarkan nilai realisasi Investasi yang ada terlihat bahwa Propinsi Riau menempati tertinggi diikuti

Propinsi Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta Selengkapnya data investasi Asing menurut Propinsi penghasil minyak dari tahun 2002 sampai 2008 disajikan pada tabel 1.2. berikut ini.

**Tabel 1.1 FDI Hulu Minyak bumi pada Propinsi Penghasil Minyak Tahun 2002-2008 (dalam Ribu USD)**

PROPINSI PENGHASIL MINYAK	TAHUN						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
N A D	116,551	72,606	46,826	34,074	29,096	31,741	27,054
SUMUT	1,415	624	1,067	1,063	623	1,679	2,507
RIAU	1,031,214	936,237	909,202	899,320	1,114,702	1,396,988	1,632,819
JAMBI	90,881	114,928	116,422	138,059	168,555	131,044	205,285
SUM SEL	151,962	166,009	137,829	128,284	182,017	213,682	249,321
LAMPUNG	322,479	339,817	275,286	297,458	299,167	338,137	390,803
BA-BEL	322,479	339,817	275,286	297,458	299,167	338,137	390,803
DKI JAYA	440,337	422,537	351,507	297,458	457,735	484,391	635,336
KEPRI	236,433	301,309	152,305	240,632	236,465	578,327	340,970
JABAR	117,858	82,720	76,221	101,212	158,568	146,254	244,533
JATIM	54,972	46,202	36,199	65,936	132,301	285,582	725,550
KALTIM	494,523	859,477	812,422	722,618	750,916	834,418	977,340
MALUKU	3,788	36,475	52,991	95,491	55,408	35,608	89,243
PAPUA	34,580	39,551	62,337	96,102	117,931	99,771	90,803
<b>JUMLAH</b>	<b>3,419,472</b>	<b>3,758,309</b>	<b>3,305,900</b>	<b>3,415,165</b>	<b>4,002,651</b>	<b>4,915,759</b>	<b>6,002,367</b>

Sumber : Ditjen Migas (diolah)

Selain potensi cadangan minyak yang ada, masuknya investasi asing (FDI) terkait juga dengan ketersediaan infrastruktur pendukung di lokasi propinsi yang bersangkutan. Infrastruktur yang dimaksud adalah: jalan, pelabuhan, listrik, telepon dan air. Akibat dari kekurangan infrastruktur serta kualitasnya yang rendah kemungkinan akan menambah biaya operasi dari suatu pengembangan lapangan yang pada akhirnya mengurangi keekonomian suatu proyek. Sehingga pada akhirnya perusahaan akan membatalkan rencana proyeknya. Karena itulah infrastruktur sangat berperan dalam proses produksi dan merupakan pra kondisi

yang sangat diperlukan untuk menarik akumulasi modal sektor swasta. Infrastruktur yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa, sehingga dapat memberikan dampak pada pengurangan biaya produksi dan peningkatan produktivitas. Seperti banyak negara lain di dunia, Indonesia juga melakukan investasi pada pembangunan jaringan pra-sarana infrastruktur transportasi berupa pembangunan jalan untuk mendukung dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tenaga kerja merupakan salah satu input (faktor) produksi yang penting dalam menghasilkan barang dan jasa. Peran tenaga kerja di suatu daerah pada satu sisi adalah sebagai penyedia input yang dibutuhkan badan usaha dan di sisi lain adalah sebagai pasar output untuk barang dan jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, tenaga kerja terutama yang memiliki ketrampilan dan keahlian berperan penting terhadap kegiatan perekonomian di suatu daerah dan pertumbuhan ekonomi.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Pertumbuhan ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting. Perusahaan asing melalui investasi merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan perekonomian domestik. Faktor lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan antara lain tampak dari kegiatan perekonomian ekspor dan impor domestik dan negara asing. Investasi asing (FDI) pada kegiatan usaha hulu minyak bumi secara makro sangat penting, bukan saja dalam peningkatan produksi minyak yang berpengaruh pada penerimaan negara, namun juga dalam peningkatan produk domestik dan penyediaan kesempatan kerja penduduk yang dapat terus meningkat. Secara regional, FDI pada kegiatan hulu minyak bumi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi (output) bagi sektoral di daerah. Namun demikian, sifat dari industri hulu minyak bumi yang padat modal, teknologi dan resiko tinggi juga merupakan suatu tantangan tersendiri. Oleh karenanya diperlukan pendekatan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait dengan usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar kegiatan perekonomian tersebut mengalami peningkatan terus

sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Bagaimana peran Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) pada Kegiatan Hulu Minyak Bumi memberikan pengaruh terhadap output sektor Pertambangan dan Penggalian Regional Propinsi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh penanaman modal asing langsung (FDI) pada kegiatan usaha hulu minyak bumi terhadap output sektor Pertambangan dan Penggalian regional propinsi 2002-2008.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat akademis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel lain yang belum tercakup dalam penelitian ini.

#### **2. Manfaat praktis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan perencanaan ekonomi domestik dan kebijakan yang akan diterapkan pada kegiatan usaha hulu minyak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Banyak faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia yang didekati oleh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) namun dalam penelitian ini yang dipertimbangkan adalah faktor-faktor yang dianggap penting saja yaitu: Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*, FDI), dan Tenaga Kerja.

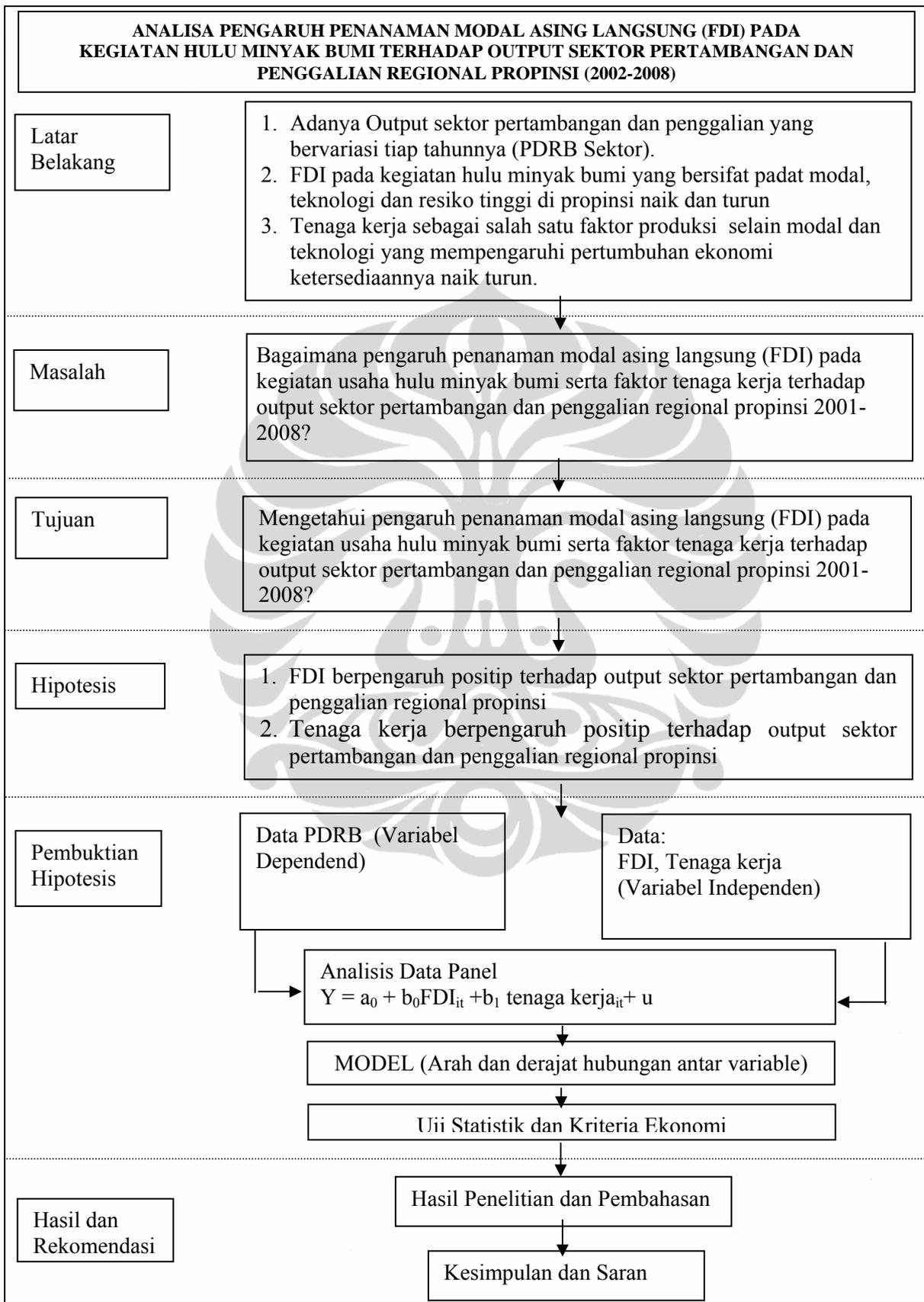
Dalam penelitian ini, Propinsi yang digunakan adalah propinsi yang merupakan daerah penghasil minyak bumi yang dibatasi dari hasil kegiatan usaha hulu minyak pada kontraktor kontrak kerja sama/operator yang berkontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan pola *Production Sharing Contract* (PSC). Untuk merefleksikan bahwa investasi kegiatan usaha hulu minyak bumi dari Penanaman Modal Asing (FDI) maka digunakan data investasi dari operator/ perusahaan asing (selain PERTAMINA). Selanjutnya, untuk mengetahui output sektoral, didekati dengan data PDRB sektor pertambangan dan penggalian pada harga konstan.

### **1.6 Hipotesa**

Dalam penelitian ini, hipotesis atau jawaban sementara yang akan dilakukan pengujian berdasarkan argumen yang berkembang dari latar belakang dan perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Diduga FDI memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap output sektor pertambangan dan penggalian regional
2. Diduga tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap output sektor pertambangan dan penggalian regional

## 1.7 Kerangka Berpikir



## **1.8 Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini disajikan secara garis besar dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **1. PENDAHULUAN**

Bab 1 ini akan membahas latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang ada, tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Hipotesa, Kerangka Berpikir dalam penulisan, dan terakhir dilengkapi dengan Sistematika dari penulisan

### **2. TINJAUAN TEORITIS**

Bab 2 ini akan memuat tinjauan pustaka, landasan teori yang digunakan, dalam penelitian ini meliputi: teori Pertumbuhan, faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi, model pertumbuhan neoklasik, teori tentang investasi, dan tinjauan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Bab 3 menjelaskan tentang metode pengumpulan data yang digunakan, variabel dan data yang digunakan, teknis analisis data, pengolahan data dengan regresi dan tahapan-tahapan dalam membuat analisis regresi

### **4. PEMBAHASAN**

Bab 4 merupakan pembahasan terhadap hasil evaluasi kualitatif dan kuantitatif serta analisis yang dilakukan terhadap model yang dibuat.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab 5 dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan pada Bab 4 serta implikasi kebijakan atau rekomendasi yang mungkin dapat dilaksanakan.